

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Politik Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari empat kabupaten yang termasuk dalam wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun.

Secara administratif Kabupaten Bantul di pimpin oleh seorang Bupati, dimana Bupati pertama adalah Raden Tumenggung Mangun Negoro yang memimpin sejak 20 Juli 1831. Pasca reformasi atau tepatnya tahun 1999, Bantul memiliki Bupati baru yaitu Idham Samawi yang menjabat mulai tahun 1999 hingga 2004. Pada Desember 2004 hingga Januari 2005, jabatan bupati di pimpin oleh Drs. Mujono NA sebagai pelaksana tugas harian. Pada tahun 2005, terlaksana pilkada langsung pertama kali di Kabupaten Bantul dalam pilkada tersebut., Idham Samawi menjadi pemenang sehingga beliau kembali menjabat sebagai Bupati Bantul dari tahun 2005 hingga 2010. Pada tahun 2010, kembali dilaksanakan pilkada untuk memenuhi jabatan Bupati Bantul selanjutnya.

Pada pilkada tahun 2010 terdapat fenomena yang menarik, dimana salah satu calon Bupati adalah istri dari Idham Samawi yaitu Sri Surya Widati

atau Ida Samawi. Pada pilkada Bantul tahun 2010 tersebut, terdapat tiga calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi Kardono-Ibnu Kardamanto, Sri Surya Widati-Sumarnodan, dan Sukardiyono-Darmawan. Pasangan nomor urut pertama merupakan calon independen, sedangkan pasangan Ida Samawi dan Sumarno di usung oleh PDIP, Golkar, PAN, dan PKB dan pasangan Sukardiyono-Darmawan di usung oleh partai Demokrat dan PKS. (Mandela, R dalam Koran Kompas, 2017)

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2015, termasuk yang berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan penyoblosan berlangsung pada 9 Desember 2015 lalu telah dilakukan di wilayah Kabupaten yaitu di Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul. Sejak hari pertama proses penghitungan suara pemilih hingga penetapan pemenang oleh masing-masing Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat per-tanggal 21 Desember 2015 yaitu pada Pemilukada Kabupaten Bantul, calon *incumbent* Sri Surya Widati berpasangan dengan Misbakhul Munir harus mengakui keunggulan paslon nomer urut satu yaitu Suharso- Abduln Halim Muslih yang di usung Partai Gerindra, PKB dengan memperoleh 261.667 suara atau 52,80 persen. Penetapan tersebut dilakukan setelah KPU Bantul melakukan penghitungan suara, dan setelah batas waktu yang ditentukan paslon yang kalah tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (Mandela, R dalam Harian Jogja, 2017)

Dalam pemilu pada tahun 2015 banyak hal yang menarik sekaligus pantas dicermati sehingga perjalanan politik dari masa ke masa cukup mengalami perkembangan yang dinamis. Dalam catatan sejarah politik, pada umumnya calon *incumbent* (petahana) memiliki peluang lebih besar untuk menanganai “perebutan kekuasaan” karena dari segi pengalaman, kesiapan perencanaan dan fasilitas penunjangnya lebih mapan dibanding calon atau kandidat yang baru muncul di kancah dunia perpolitikan. Hal demikian terbukti bahwa di beberapa tempat yang melangsungkan pemilu serentak 2015 kebanyakan dimenangi paslon *incumbent*.

Seperti yang terjadi di DIY, di Kabupaten Sleman dan Gunungkidul *incumbent* melenggang sukses mendulang suara pemilih, sehingga tak kehilangan kekuasaan yang pernah diraihinya. Namun kelaziman ini terpatahkan dengan hadirnya “pendatang baru” dalam pertarungan perebutan kekuasaan di pemilu Bantul. Suharsono-Abdul Halim Muslih, yang pada awalnya perjalanannya mengalami liku-liku jalan terjal sejak penjarangan melalui kendaraan politik, pendaftaran hingga penetapan untuk maju sebagai kandidat akhirnya menuai sukses. Bahkan, banyak pihak terdecak kagum melihat strategi maupun taktik sekaligus praktik politik yang diterapkan.

Sehari usai pemungutan suara, pemberitaan media cetak diantaranya menyebutkan: “Harsono-Halim secara mengejutkan mampu merebut kepemimpinan Kabupaten Bantul dari pasangan petahana Sri Surya Widati dan Misbakhul Munir” (Tribun Jogja, 10/12). Hal ini cukup diluar dugaan karena saat proses pencalonan sempat muncul wacana calon tunggal

mengingat kekuatan dan kekuasaan Ida di Bantul, bahkan Harsono-Halim di tuding sebagai sebagai calon boneka. Sementara aspirasi yang terus berkembang di tingkatan akar rumput masing-masing parpol pendukung *incumbent* kurang mendapat respon atau kurang terakomodasi.

Pada bagian lain, kehidupan sosial dan politik di Bantul yang terus berkembang sejalan dengan tumbuhnya aspirasi rakyat kurang mendapat perhatian serius, sehingga calon *incumbent* Ida - Munir hanya mengandalkan jaringan dengan parpol-parpol yang menguasai kursi dewan (DPRD) sebagai sumberdaya politik yang dianggap kuat, bahkan cenderung mengandalkan jaringan birokrasi serta dukungan mesin politik dari partai pengusung/pendukung (PDIP, Nasdem, Golkar, maupun ormas-ormas serta berbagai komunitas yang menyatakan diri sebagai simpatisannya). Itu semua kurang berjalan efektif mengingat mesin politik hanya bersifat temporer, sebatas bergerak di permukaan.

Marketing politik dan Relawan Perubahan Kondisi riil untuk memenuhi kepentingan rakyat Bantul yang terus berjalan sering berkembangnya aspirasi dari waktu ke waktu agaknya mendapat perhatian serius Suharsono sebagai kandidat yang siap bertarung dalam Pemiluakada Bantul. Tim relawan yang dibentuk mampu memetakan dan merumuskan persoalan dalam lingkup Bantul untuk segera di cari jawabannya. Persoalan biaya pendidikan, kesehatan yang masih memperhatikan dan membebani masyarakat. Kurang optimalnya capaian kesejahteraan masyarakat di tandai ketidakmerataan bantuan/perlindungan bagi masyarakat menengah kebawah, serta berbagai

persoalan yang sempat bersentuhan dengan hukum, terutama berkaitan dengan *clean government* maupun *good governance* telah menjadikan rangkuman isu kampanye secara berkelanjutan.

Tuntutan berbagai persoalan yang sering dikumandangkan oleh banyak kalangan terutama para penggiat LSM Bantul tersebut juga menginspirasi kubu Suharsono untuk mengemasnya ke dalam sebuah *marketing* politik, dengan bidikan pasarknya kalangan kawula muda di Kabupaten Bantul. Kecerdasan dalam membidik simpatisan dibarengi data terkini dan kondisi nyata di lapangan telah membuahkan hasil berupa membanjirnya dukungan yang terus mengalir secara simulatan.

Walaupun Suharsono – Halim ini tidak memiliki Tim sukses, hanya membentuk Tim Relawan, namun para pekerjanya bisa bersinergi dan bekerjasama untuk mencapai visi: “Terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religusitas dalam wadah Negara Keatuan Republik Indonesia (NKRI). Kekompakan relawan Tim Suharsono – Halim yang terbagi dalam beberapa level menunjukkan pula bahwa mekanisme kerja tim cukup solid dan proposional. Di level pertama, ada tim kerja intelektual, level kedua adalah tim kerja organisasi atau ketatausahaan, di level ketiga yaitu mereka yang bekerja di lapangan.

B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

1. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Dalam upaya memberikan kesejahteraan dan membuka peluang investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap sistem pelayanan perizinan dengan pola pelayanan satu pintu. Paradigma bahwa Pemerintah adalah pelayan sedangkan masyarakat adalah pelanggan (*customer*) yang harus dilayani secara prima, dengan menghilangkan kesan prosedur yang berbelit-belit, persyaratan yang tidak jelas, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak pasti dan petugas yang tidak ramah.

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul merupakan lembaga baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas yang beroperasi sejak tanggal 2 Januari 2008 itu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007. Sebelum dibentuk Dinas Perijinan, pelayanan perizinan di Kabupaten Bantul dipusatkan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Namun demikian, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, keberadaan UPTSA tersebut dirasa masih kurang mampu memenuhi tuntutan pelayanan perizinan yang semakin prima. Sementara di sisi lain, kualitas pelayanan perizinan dalam era otonomi daerah dan persaingan global saat ini, bisa sangat menentukan eksistensi dan daya saing suatu daerah.

Sesuai dengan visi Bantul Progotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis, spirit pembentukan Dinas Perijinan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menginginkan proses pelayanan yang mudah, murah, cepat, tepat waktu, bersih dan akurat. Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan membuka peluang investasi sebanyak-banyaknya di Kabupaten Bantul.

Investasi tersebut dipandang penting untuk memberikan kontribusi pada percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang selama ini sebagian besar masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kedepan sektor ini tidak bisa lagi menjadi andalan karena lahan pertanian semakin lama semakin menyusut, seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Dinas Perizinan dibentuk untuk menjawab permasalahan tersebut. Sesuai dengan paradigma pemerintahan yang baru, masyarakat adalah pelanggan (customer) yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. (diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 22.43 WIB)

Pada awal tahun 2017 Dinas Perizinan berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Hal tersebut dikarenakan untuk melakukan urusan penanaman modal dan menyokong bidang penanaman modal yang saat ini ada di Dinas tersebut.

2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 - a. Visi : *“Dinas terpercaya dengan pelayanan prima, integritas dan profesionalisme”*.
 - b. Misi
 - a) Mewujudkan aparaturnya yang berkualitas.
 - b) Melaksanakan Pelayanan Prima di bidang Perizinan.
 - c) Mengelola dokumen dan data perizinan dengan baik dan tertib.
 - d) Melaksanakan sistem informasi dan pelayanan secara elektronik.
 - e) Melaksanakan pengawasan pengendalian dan penyelesaian pengaduan secara cepat, tepat, adil, dan profesional.
3. Azas Pelayanan
Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Kesamaan Hak, Efisien, Efektif, Keseimbangan, Profesional dan Keadilan
4. Prinsip Pelayanan
Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian dan Tanggung Jawab.
5. Motto
Mudah, Murah, Cepat, Tepat Waktu, Bersih dan Akurat
6. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
 - a. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretarias Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

c. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

7. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Bantul

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- 3) Bidang Penanaman Modal
 - a. Seksi Pengembangan, Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - b. Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal
- 4) Bidang Pelayanan dan Informasi
 - a. Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan
 - b. Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi
- 5) Bidang Pendataan dan Penetapan
 - a. Seksi Pendataan
 - b. Seksi Penetapan
- 6) Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian
 - a. Seksi Pengaduan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- 7) UPT, dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam melakukan tugasnya dalam bidang penanaman modal yaitu meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Berikut ini adalah jumlah perusahaan yang melakukan perizinan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada tahun 2016 dan 2017:

Tabel 2.4

Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN (Rp)	Nilai Investasi PMA (Rp)
2016	5	37	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00
2017	15	46	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00

Sumber: di peroleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada tahun 2018

Keterangan:

- 2016, TW I dan TW II kurs U\$\$ 1 = Rp 13.900 sesuai APBN, TW III dan IV kurs U\$\$ 1 = Rp 13.500 sesuai APBN-P
- 2017, TW I dan TW II kurs U\$\$ 1 = Rp 13.300 sesuai APBN, TW III dan TW IV kurs U\$\$ 1 = Rp 13.400 sesuai APBN-P

Dari data diatas menjelaskan bahwa jumlah proyek Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2016 ada sebanyak 5 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp 564.682.781.966,05 dan jumlah proyek Penanaman

Modal Asing pada tahun 2016 ada sebanyak 37 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp 550.714.055.730,00. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah proyek Penanaman Modal Dalam Negeri ada sebanyak 15 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp 601.765.581.966,05 dan jumlah proyek Penanaman Modal Asing sebanyak 46 dengan nilai investasi sebesar Rp 655.549.055.730,00.